

Judul : Kabinet Merah Putih : Purbaya-Trenggono Saling Sindir, Ujian Soliditas Kabinet?
Tanggal : Kamis, 12 Februari 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

KABINET MERAH PUTIH

Purbaya-Trenggono Saling Sindir, Ujian Soliditas Kabinet?

Nikolaus Harbowo

Perselisihan antarmenteri Kabinet Merah Putih berulang. Setelah sempat ramai ucapan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar soal *taubat nasuha* ke sejumlah menteri, kini Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saling sindir dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Dengan kalimat yang tergolong keras untuk sekelompok pejabat negara, Trenggono meminta Purbaya memastikan validitas informasi sebelum menyampaikannya kepada publik. Pernyataan yang diunggah di media sosial itu merespons pernyataan Purbaya dalam sebuah acara yang digelar Kamar Dagang dan Industri Indonesia di Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Dalam forum yang juga dihadiri Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo itu, Purbaya mengaku heran industri galangan belum juga menerima pesanan dari Kementerian Kelautan dan Per-

ikanan. Padahal, anggaran pengadaan kapal dari Kementerian Keuangan sudah cair. Purbaya mengaku, mendapatkan informasi itu dari pelaku industri kapal dan galangan dalam negeri.

Tak berselang lama, Trenggono merespons pernyataan Purbaya. "Yang terhormat Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah Inggris. Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, bener nggak itu uang kapal sudah dikucurkan", tulis Trenggono dalam akun Instagram miliknya, Selasa.

Pernyataan itu diunggah dengan menampilkan tangkapan layar tayangan televisi yang memuat pernyataan Purbaya.

Berselang sehari, Rabu (11/2), di Kompleks Parlemen, Jakarta, Purbaya, saat dikonfirmasi mengenai perselisihan dengan Trenggono, mengatakan bahwa pernyataannya sebelumnya didasarkan pada informasi dari pelaku industri galangan kapal. Namun, ia menyatakan terbuka jika da-

ta yang dimilikinya keliru.

"Oh, saya enggak tahu, kan, dia (Trenggono) suka promosi kapal banyak. Saya *cuman* cek, kan, ke galangan, ada enggak yang di-order, ya belum. Berarti, kan, belum ada pesanan ke sana. Mau dibikin kapan saya enggak tahu. Ya udah enggak apa-apa. Yang betul Pak Trenggono. Mungkin saya datanya salah," ucapnya.

Ia menambahkan, meski benar sebagian pendanaan berasal dari pinjaman luar negeri, mekanismenya tetap melalui Kementerian Keuangan.

Beberapa jam kemudian, Trenggono kembali merespons. Ia mengunggah foto dirinya tengah makan bersama Purbaya dalam satu meja di akun Instagramnya. "*That's all folks* (sekian dulu semuanya), *Back to work* (kembali kerja) ya", tulisnya dalam unggahan.

Perseteruan terbuka semacam ini bukan hal baru di kabinet Prabowo. Beberapa bulan sebelumnya, tepatnya awal Desember 2025, Muhaimin Iskandar melontarkan seruan yang juga menuai kontroversi. Ia meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

(ESDM) Bahlil Lahadalia agar melakukan *taubat nasuha* setelah banjir dan longsor di Sumatera menewaskan lebih dari 900 orang.

Muhaimin juga meminta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq melakukan hal serupa. *Taubat nasuha* berarti bertobat sungguh-sungguh dan tulus.

Muhaimin meminta para menteri yang ia sebut mengevaluasi total seluruh kebijakan yang mereka buat agar bencana serupa tidak terulang.

Benahi pola komunikasi

Melihat rangkaian fenomena tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman meminta para menteri membenahi pola komunikasi di internal kabinet. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menilai, persoalan di internal kabinet kerap bukan terletak pada koordinasi kebijakan, melainkan penyampaian informasi yang tidak utuh di ruang publik hingga memicu kontroversi.

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa Daniel Johan

menilai, perdebatan di internal kabinet tidak semestinya dipertontonkan di ruang publik.

"Kelihatan *nggak* kompak dipertontonkan di hadapan rakyat, bikin masyarakat semakin bingung nanti, seperti tidak solid, tidak ada koordinasi antarkementerian," ujarnya.

Ia menilai, perdebatan seharusnya diselesaikan secara internal sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi kerja pemerintahan. Peristiwa ini menjadi peringatan bagi jajaran kabinet Presiden Prabowo untuk membenahi komunikasi dan koordinasi.

Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli berpandangan, kasus-kasus perseteruan antarkomponen kabinet tidak hanya menunjukkan persoalan soliditas di antara para menteri. Hal itu juga berpotensi mencoreng citra kabinet.

Dalam situasi semacam itu, Lili menilai, persoalan seharusnya bisa diselesaikan di tingkat menteri tanpa perlu melibatkan Presiden. "Di sini peran menteri koordinator yang membimbing harus turun tangan untuk mendamaikan," ujarnya.